

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakry, Hasbullah. 1984. *Di Sekitar Filsafat Skolastik Islam*. Jakarta: Tinta Mas.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fajar, N.D. Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Muhammad. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Purwokerto: Stain Press.
- Fauzi, Noer dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati otonomi daerah*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- HR, Syauckani. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Isjwara, Fred. 1974. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.

- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Karinga, hendra. 2015. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum, cet.3*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.s
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabupranoto, Koentjoro. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Serundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soehino. 2004. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sojito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- _____, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik. 2013. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Ekonomi Volume 17.
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Bandung: FHPM Univ. Negeri Padjajaran.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuswanto. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Lampung: Justice Publisher.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934.

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5.

C. Referensi Lainnya:

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Modul Pelatihan: *Pengawasan Pembanguna Desa dan Keuangan Desa*. PATTIRO JEKA dan PATTIRO AIPJ.

Kementerian Dalam Negeri. 2015. *Buku Indeks Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/> tanggal 12 November 2016 pukul 15.30 WIB.

Tim BEPEKA. 1998. *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksan Keuangan*. Jakarta: BEPEKA.

Penabulu Alliance (Aliansi Masyarakat Sipil). 2015. *Keuangan Desa, Serial : Pengelolaan Keuangan Desa*. Unit Pendukung Keuangan Desa, Media Referensi dan Diskusi Keuangan Desa. Diakses melalui <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04/01.-Asas-Kekuasaan.pdf> atau <http://penabulualliance.org/>

Dokumen RPJM Desa 2014 – 2019 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2019).

Dokumen Perubahan RPJMDesa 2014 – 2019 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2019).

Dokumen RKPDesa 2016 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016).

Dokumen Rencana APBDesa 2016 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana APBDesa Tahun Anggaran 2016).

Dokumen APBDesa 2016 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016).

Dokumen Perubahan APBDesa 2016 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016).

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Peringsurat Tahun Anggaran 2016.

Dokumen Laporan Semester Pertama Realisasi Pelaksanaan APBDesa Peringsurat Tahun Anggaran 2016.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Pringsurat (Peraturan Desa Pringsurat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016).

Hasil wawancara dengan Bapak Camari (Kepala Desa) hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Balai Desa Pringsurat.

Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Harsanto (Bendahara PTPKD) hari Senin, tanggal 7 Februari 2017 pukul 09.00 WIB di Balai Desa Pringsurat.

Hasil wawancara dengan Bapak Harso Carito (Perangkat Desa Pringsurat) hari Senin, tanggal 7 Februari 2017 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Pringsurat

Hasil wawancara dengan Bapak Subiyanto (Bendahara Desa Pringsurat) hari Senin, tanggal 7 Februari 2017 pukul 09.00 WIB di Balai Desa Pringsurat.

Hasil wawancara dengan Bapak Akrom Assani (Ketua BPD Pringsurat) hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.30 WIB di Desa Pringsurat.